

## **REFORMULASI KURIKULUM PESANTREN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KWALITAS PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN**

**Moh. Fudholi**  
**STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan**  
**Are\_lee\_81@yahoo.co.id**

*Islamic boarding school is one of Islamic educational institutes existed during the Dutch colonization era and a place for Muslim cadre's improvement spread out in the line of society. The existence of Islamic boarding school becomes a fortification of Muslim from any circumstances and condition faced by Indonesian, during the colonization era up to now. The intricacies of struggle done by all of alumnus from struggle of divesting from the hegemony of colonization, establishing revolution, forming a sovereign government carrying infrastructures out till finally participating in conducting a reformation.*

*Now day's Islamic boarding schools are demanded to revamp. One of things becoming attention is the curriculum used in Islamic boarding school. All this time, curriculum oriented by parts of Islamic boarding school is still about religious knowledge and salaf holly books. Parts of the owners of boarding school are still tendentious in defending or orienting back to the past methods (salaf). They have not felt yet about the needs of Islamic boarding school improvement by putting non-religious materials into the Islamic boarding school curriculum. Based on the explanation above, thus it is formulated how is the formula of Islamic boarding school curriculum improvement as an alternative of educational quality enhancement in Islamic boarding school and how is the system and action of curriculum development of Islamic boarding school in increasing the quality of its education.*

*In general, the factors becoming a background of enhancing curriculum in Islamic boarding school can be grouped into two factors, internal and external factors. Internal factors cover, (a) the initiation of the owners to increase the quality of student's knowledge. (b) the wish of Islamic boarding school owners to increase the efficiency and effectiveness of teaching in Islamic boarding school (c) the wish for alumnus to be ready of action in society. Meanwhile, the external factors are (a) the development of science and technology. (b). the influence of educational system dynamics (c). the demand of society and alumnus. The development implementation of curriculum of Islamic boarding school covers some principal components; these are component, purpose, material, strategy, and evaluation.*

*Keywords: Islamic boarding school, curriculum*

## Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan merupakan suatu wadah tempat penggodokan kader umat Islam yang telah tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan pesantren merupakan benteng umat Islam dari berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia, sejak dari masa penjajahan hingga masa sekarang. Liku-liku perjuangan yang dilakukan oleh para alumninya mulai dari perjuangan melepaskan diri cengkeraman penjajahan, mengadakan revolusi, membentuk pemerintahan yang berdaulat, melaksanakan pembangunan sampai pada akhirnya ikut berperan dalam mengadakan reformasi.

Menurut Etimologi (arti bahasa) perkataan pesantren berasal dari kata *santri* dengan awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para

santri.<sup>23</sup> Selain itu, menurut Wahjoetomo sebagaimana dikutip oleh A. Syafi'i Noer menjelaskan bahwa asal kata pesantren adalah gabungan dari kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat berarti "tempat pendidikan manusia baik-baik".<sup>24</sup>

Sedangkan pesantren secara terminologi adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Perkataan "tradisional" disini menunjukkan bahwa lembaga ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, sekitar 300 – 400 tahun yang lalu dan telah menjadi bagian

<sup>23</sup> Hasyim Munip, *Pondok Pesantren Berjuang*, (Sinar Wijaya, Surabaya, 1992), hlm: 6

<sup>24</sup> Ahmad Syafi'i Noer, *Pesantren: Asal Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan*, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001), hlm: 104

yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian umat Islam di Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat.<sup>25</sup> Tradisional ini tidak berarti statis tanpa mengalami perubahan dan perkembangan, tetapi mempunyai makna yang dinamis. Dengan kata lain, tradisional lebih merupakan lawan modern. Oleh Noer Cholis Madjid istilah ini diperhalus, untuk tidak menyebutkan *salafiyah* dengan istilah penganut sistem nilai *ahlus sunnah waljama'ah*.<sup>26</sup>

Sementara itu Sudjoko Prasodjo, memberikan definisi bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang kiyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri

berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama' abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.<sup>27</sup>

Meskipun sistem pendidikan pesantren pada awalnya bercorak tradisional, dalam perkembangan berikutnya ia lebih bersifat dinamis, adaptif, emansipatif, dan responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Agaknya pesantren tidak membiarkan dirinya dalam ketradisional yang berkepanjangan, tetapi lebih pada adaptasi dan adopsi nilai-nilai baru, baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam sistem pendidikannya. Melihat dinamika ini, pesantren dalam bentuknya yang sudah terpoles oleh nilai-nilai baru itu tidak menampakkan karakteristiknya yang asli, seperti masa awal perkembangannya. Maka akhir-

<sup>25</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (INIS, Jakarta, 1994), hlm: 55

<sup>26</sup> Noer Cholis Madjid " *Bilik-Bilik Pesantren*": *Sebuah potret perjalanan*, (Paramadina, Jakarta, 1997), hlm: 31

<sup>27</sup> Sudjoko Prasodjo et al, *Profil Pesantren*, (LP3ES, Jakarta, 1982), hlm: 6

akhir ini sulit ditemukan sebuah pesantren yang bercorak tradisional murni. Karena pesantren sekarang telah mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga menjadi corak yang berbeda-beda.<sup>28</sup>

Dilihat dari transformasi tersebut sekurang-kurangnya pesantren dapat dibedakan menjadi tiga corak (tipe) yang meliputi :

## Tipologi Pesantren

### 1. Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama'abad ke 15 dengan menggunakan bahasa arab. Dalam sistem pengajarannya tidak disisipkan sama sekali pendidikan umum, atau tidak keluar dari jalur madzhab tertentu. Para santri biasanya

mengkaji kitab secara kontinyu, dari awal sampai tamat, dibawah bimbingan guru atau kiai. Bahkan metodenya sangat monoton, dengan fasilitas yang sangat sederhana. Begitu pula aktivitas spritual atau sufistiknya masih menonjol. Tidak ada inovasi yang fenomenal dalam corak pesantren ini. Umumnya pesantren ini masih eksis di daerah-daerah pedalaman atau *country side*.

### 2. Pesantren Transisional

Pesantren dalam corak ini sudah mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi tidak sepenuhnya. Prinsip selektivitas, untuk menjaga nilai tradisional masih terpelihara. Nilai-nilai positif dari sistem pendidikan modern diambil sebagai pelengkap atau pendukung sistem tradisional; misalnya metode pengajaran dan beberapa rujukan tambahan, yang dianggap dapat

<sup>28</sup> Hasan Basri, Pesantren : *Karakteristik dan unsur-unsur Kelembagaan, op cit*, hlm: 124

menambah wawasan para santri, sebagai penunjang kitab-kitab klasik. Demikian juga dalam manajemen dan administrasi sudah mulai ditata secara modern meskipun sistem tradisionalnya tetap dipertahankan. Dalam suksesi kepemimpinan misalnya masih berporos pada keturunan. Wewenang dan kebijakan pendidikan tetap dipegang oleh seorang figur yang karismatik.

Pondok pesantren model ini oleh M. Bahri Ghazali dikatakan dengan "pesantren **Komprehenship**". Hal itu karena sistem pendidikan dan pengajaran dalam pondok pesantren tipe ini sudah mengadakan penggabungan antara yang tradisional dan yang modern. Artinya, di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan, dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan

terus dikembangkan. Bahkan pendidikan keterampilan pun diaplikasikan.<sup>29</sup>

Pesantren dengan corak transisional ini dapat dikatakan telah mengalami perubahan dan pergeseran nilai, namun nilai-nilai lama tetap menjadi tolok ukur dalam setiap kebijakan. Berbeda dengan corak tradisional yang para santrinya cenderung *submissive* kepada kiyai, corak transisional ini memberikan kebebasan menyatakan pendapat kepada santrinya. Dari segi kelembagaan dan organisasi, pesantren corak ini sudah ada semacam Yayasan, pesantren mulai dikelola dan diatur oleh sebuah badan atau kepengurusan yang dibentuk dengan kesepakatan bersama.

### 3. Pondok Pesantren Modern

<sup>29</sup> DR. M. Bahri Ghazali MA, *Pendidikan Pesantren berwawasan Lingkungan*, (Pedoman Ilmu jaya, Jakarta: 2001), hlm: 15

Pesantren corak ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun dalam unsur kelembagaannya. Materi pelajaran dan metodenya, misalnya, sepenuhnya menganut sistem modern. Pesantren sudah diatur dan dikelola dengan manajemen dan administrasi yang rapi. Pendidikan secara klasikal sudah diterapkan dan keterampilan atau keahlian pun dijadikan sebagai pokok kajian. Pengembangan minat dan bakat sangat diperhatikan, sehingga para santri dapat menyalurkan bakat dan hobinya secara proporsional. Sistem pengajaran dilaksanakan dengan porsi sama antara pendidikan agama dan umum. Penguasaan bahasa asing (bahasa arab dan inggris), terutama

percakapan, sangat ditekankan.<sup>30</sup>

### **Karakteristik Pendidikan Pesantren**

Karakteristik pendidikan pesantren dapat diketahui dari berbagai segi yang meliputi keseluruhan sistem pendidikan : Materi Pelajaran dan Metode Pengajaran, prinsip-prinsip pendidikan, sarana dan tujuan pendidikan pesantren, kehidupan kiyai dan santri serta hubungan keduanya.<sup>31</sup>

#### **1). Materi Pelajaran dan metode Pengajaran**

Sebagai lembaga pendidikan islam, pesantren pada dasarnya mengajarkan agama, sedangkan sumber kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa arab. Pelajaran yang dikaji di pesantren ialah al Qur'an dengan tajwidnya dan tafsirnya, aqid dan ilmu kalam, fiqh dan ushul fiqh,

<sup>30</sup> Hasan Basri, *op cit*, hlm :126

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm: 100

hadits dan musthalah al hadits, bahasa arab dengan ilmu alatnya seperti nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, badi' dan arudh, tarikh, mantiq dan tasawuf. Kitab yang dikaji di pesantren umumnya kitab-kitab yang ditulis dalam abad pertengahan, yaitu antara abad ke- 12 sampai dengan abad ke- 15 atau lazim disebut dengan kitab kuning.

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren ialah *Wetonan*, *sorogan*, dan *hafalan*. Metode wetonan adalah metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Istilah weton dari kata *wektu* (jawa) yang berarti waktu; karena pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan salat

fardlu (lima waktu). Di Jawa barat, metode ini disebut dengan *bandongan*; sedangkan di Sumatra disebut dengan *halaqah*. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan *balaghan*, yaitu belajar dengan kelompok (*group*) yang diikuti oleh seluruh santri. Biasanya kiai menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya.

Metode *Sorogan* ialah suatu metode dimana santri menghadap guru atau kiyai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kiai membacakan dan menerjemahkannya kalimat demi kalimat; kemudian menerangkan maksudnya. Santri menyimak bacaan kiai dan mengulanginya sampai memahaminya, kemudian kiai mengesahkan (jawa: *ngesahi*), jika santri sudah benar-benar mengerti,

dengan memberikan catatan pada kitabnya untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh kiai kepadanya. Istilah sorogan berasal darikata *sorog* (jawa) yang berarti menyodorkan kitab ke depan kiai atau asistennya. Zamakhsyari Dzoefir mengatakan bahwa metode *sorogan* ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan islam tradisional; sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi santri.<sup>32</sup> Kendati pun demikian metode seperti ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk tanya jawab langsung.<sup>33</sup>

Metode *hafalan* ialah suatu metode dimana santri

menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Biasanya cara menghafal ini diajarkan dalam bentuk syair atau *nadzom*. Dengan cara ini memudahkan santri untuk menghafal, baik ketika sedang belajar maupun di saat berada diluar jam belajar. Namun begitu metode ini mengandung sisi kelemahan, antara lain santri cenderung mengikuti saja apa yang dikatakan oleh kiainya, tanpa ada penalaran dan analisis yang cermat.

Dari sekian pesantren tradisional yang ada sampai sekarang masih menggunakan ketiga metode tersebut dalam sistem pengajarannya. Dengan begitu pesantren masih mempertahankan keunikannya.

## 2). Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-

<sup>32</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandanga Hidup Kiai*, (LP3ES, Jakarta 1990), hlm: 7

<sup>33</sup> Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*, (Cemara Indah, Jakarta, 1978 ), hlm 20

lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya, kenaikan tingkat seorang santri ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang santri telah menguasai suatu kitab atau beberapa kitab dan telah lulus *imtihan* (Ujian) yang diuji oleh kiainya maka ia berpindah ke kitab yang lain. Jadi, jenjang pendidikan tidak ditandai dengan naiknya kelas seperti dalam pendidikan formal, tetapi pada penguasaan kitab-kitab yang telah ditetapkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.<sup>34</sup>

### 3). Fungsi Pesantren

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama (lembaga da'wah).

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan non formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama' fiqh, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawuf. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka. Sementara itu setiap hari menerima tamu dari masyarakat umum, baik dari masyarakat sekitar atau dari masyarakat jauh. Mereka yang datang mempunyai motif yang berbeda-beda; ada yang ingin bersilaturahmi, ada yang berkonsultasi, meminta nasihat, memohon do'a, berobat, dan ada pula yang meminta jimat untuk penangkal gangguan dalam

<sup>34</sup> Kafrawi, *op cit*, hlm 20-21

kehidupan sehari-hari. Sebagai lembaga penyiaran agama islam, Masjid pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum, yakni sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi para jama'ah. Masjid pesantren sering dipakai untuk *majlis taklim* (pengajian), diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya.

Sehubungan dengan tiga fungsi tersebut, pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, dan menjadi rujukan moral bagi kehidupan masyarakat umum. Masyarakat umum memandang pesantren sebagai komunitas khusus yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral keagamaan. Karakteristik pesantren dilihat dari segi fungsinya, dan memang sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, menjadikannya semakin eksis dan dapat diterima

(*acceptable*) oleh semua kalangan.

#### **4).Prinsip-Prinsip Pendidikan pesantren**

Sesuai dengan fungsinya yang komprehensif dan pendekatannya yang holistic, pesantren memiliki prinsip-prinsip utama dalam menjalankan pendidikannya. Setidak-tidaknya ada dua belas prinsip yang dipegang teguh pesantren : (1) *theocentric* (2) suka rela dalam pengabdian, (3) kearifan, (4) kesederhanaan, (5) kolektivitas, (6) mengatur kegiatan bersama, (7) kebebasan terpimpin, (8) kemandirian, (9) pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan (10) mengamalkan ajaran agama, (11) belajar di pesantren bukan untuk mencari *ijazah*, (12) *restu kiai*, artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat bergantung pada kerelaan dan do'a dari kiai.

Prinsip-prinsip pendidikan tersebut, agaknya merupakan nilai-nilai kebenaran universal, dan pada dasarnya sama dengan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat pada umumnya. Dengan nilai-nilai itu pula di pesantren senantiasa tercipta ketentraman, kenyamanan, dan keharmonisan.

#### **5). Sarana dan Tujuan Pesantren**

Dalam bidang sarana, pesantren tradisional ditandai oleh ciri khas kesederhanaan. Sejak dulu lingkungan atau kompleks pesantren sangat sederhana. Tentu kesederhanaan secara kini telah berubah secara total. Banyak pesantren tradisional yang memiliki gedung yang megah. Namun kesederhanaan dapat dilihat dari sikap dan perilaku santri dan kiai serta sikap mereka dalam pergaulan sehari-hari. Sarana belajar misalnya, masih tetap dipertahankan

seperti sediakala, dengan duduk di atas lantai dan di tempat terbuka dimana kiai menyampaikan pelajaran.

Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat. Karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitarnya.<sup>35</sup>

Secara historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*Indigeneous*). Sebab, lembaga serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak

<sup>35</sup> Hasan Basri, *Pesantren : Karakteristik dan unsur-unsur Kelembagaan*, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2001), hlm: 101

masa Hindu – Budha.<sup>36</sup> Sebelum Islam hadir, model pendidikan pesantren digunakan oleh pemeluk Hindu dan Buddha untuk mendidik calon-calon pendeta yang akan bekerja menyebarkan ajaran-ajaran agamanya. Ketika Islam datang sistem pendidikan dan pengajaran seperti itu ditiru oleh para muballigh dengan mengubah substansi ajarannya tanpa mengubah sistem yang telah ada. Karakteristik dasar yang diambil oleh pesantren Islam adalah siswa tinggal di asrama (pondok) dan menjalani kehidupan keagamaan bersama dengan guru (kiai) selama mereka menjalani pendidikan.<sup>37</sup>

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren pada awal mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Dengan

menyediakan kurikulum yang berbasis agama (*religion-based curriculum*), pesantren diharapkan mampu melahirkan alumni yang kelak diharapkan mampu menjadi figur agamawan yang demikian tangguh dan mampu memainkan dan membiasakan peran propetiknya pada masyarakat secara umum. Artinya, akselerasi mobilitas vertikal dengan penjajahan materi-materi keagamaan menjadi prioritas - untuk tidak mengatakan satu-satunya prioritas - dalam pendidikan pesantren. Akibatnya, pemberian ruang yang demikian besar pada ilmu-ilmu keagamaan telah menciptakan penghalang mental untuk melakukan perubahan di tubuhnya sendiri.

Padahal, di tengah gegap gempita dan kompetisi sistem pendidikan yang ada, pesantren - sebagai lembaga pendidikan tertua yang masih bertahan hingga kini - tentu saja harus sadar bahwa penggiatan diri

<sup>36</sup> Achmad Syafi'i Noer, *Pesantren : Asal Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan, op cit*, hlm: 89

<sup>37</sup> Imdadun Rahmat, *Pesantren Menjajaki Perubahan*; dalam Majalah Pesantren, Edisi XI, Januari 2003, hlm: 6

melulu pada wilayah keagamaan tidak lagi memadai. Pesantren dituntut untuk senantiasa apresiatif sekaligus selektif dalam menyikapi dan merespon perkembangan. Pragmatisme budaya yang kian menggejala sejatinya bisa dijadikan pertimbangan lain bagaimana seharusnya pesantren mensiasati fenomena tersebut. Bukannya malah menutup diri, pesantren sejatinya membuka diri sekaligus menjajaki perubahan, dan pada saat yang sama, pesantren harus pro aktif dan memberikan ruang bagi perubahan.<sup>38</sup>

Apalagi dewasa ini, pesantren yang dulu dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, selalu berada di wilayah pinggiran, bahkan pernah dipandang sebagai simbol keterbelakangan, kekolodan, kebodohan, kejumudan, kekumuhan dan seterusnya, akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan, baik

yang datang dari dalam maupun luar Islam, bahkan dari luar negeri yang non Islam, yang bertujuan untuk mencari alternatif sistem pendidikan. Hal ini karena di dorong dari adanya suatu anggapan bahwa sistem pendidikan yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, bahkan dirasa tidak benar sehingga perlu dicari sistem pengganti dan perlu dicobanya, dan hal itu dicari dalam pondok pesantren.<sup>39</sup>

Lebih-lebih pada saat ini, pesantren yang dulu hanya sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, kini pemerintah sudah memberikan ruang khusus dan dimasukkan dalam sistem pendidikan Nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 ayat 4 yang berbunyi :

*"Pendidikan keagamaan berbentuk ajaran diniyah,*

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaun Santri*, (LKM, DIY: 1995), hlm:85

*pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk yang sejenis*".<sup>40</sup>

Dengan demikian pesantren yang dulu tidak pernah menginjak "rumah" negara, kini telah menjadi bagian dari keluarga yang sebenarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pesantren pada saat ini lebih diakui dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya lembaga khusus yang mengurus pesantren dari tingkat pusat hingga daerah yang bernama Dirjen Kepesantrenan.

Selain itu, perhatian pemerintah terhadap pesantren juga diwujudkan dalam keputusan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 01 / U / KB / 2000 dan Nomor: MA / 86 / 2000, tentang Pondok Pesantren salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun yang ditindak lanjuti dengan penerbitan petunjuk teknis penyelenggaraan program.<sup>41</sup>

Dari itu, pesantren pada saat ini dituntut untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian yaitu kurikulum yang digunakan di pesantren. Selama ini kurikulum yang dipedomani oleh sebagian pesantren masih berkisar dalam masalah ilmu agama dan kitab kuning. Sebagian pemimpin-pemimpin pesantren masih cenderung mempertahankan dan atau kembali pada pola-pola lama (*salaf*). Mereka masih belum merasakan akan kebutuhan pengembangan pesantren dengan memasukkan materi pelajaran non-agama ke dalam kurikulum pesantren.

Hal itu menurut KH. Abdurrahman Wahid dapat dimengerti, karena setelah

<sup>40</sup> UUD RI NO: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Citra Umbara, Bandung: 2003), hlm: 20

<sup>41</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kependidikan*, (Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2001), hlm: 316

pelaksanaan pola pengembangan utama berupa pencampuran antara komponen-komponen agama dan non agama (kemudian disebut pelajaran umum) dalam kurikulum pesantren selama beberapa puluh tahun, tidak banyak hasil yang diperoleh, malah porsi komponen agama semakin lama semakin menurun dengan membawa akibat mentahnya lulusan yang dihasilkan oleh pesantren, tidak menjadi agamawan yang berpengetahuan agama yang mendalam, dan juga tidak menjadi ilmuan non-agama yang cukup tinggi kualitasnya. Yang terjadi adalah pembaruan (*akulturasi*) yang tidak memperlihatkan identitas yang jelas. Menghadapi kenyataan yang seperti ini, sebagian pemimpin pesantren-pesantren utama lalu cenderung untuk kembali pada "cara *salaf*", dimana porsi pelayanan pada komponen-komponen non-agama dalam kurikulumnya hampir-hampir tidak ada.

Hal itu - masih menurut beliau - sebenarnya dapat membahayakan kelangsungan hidup pesantren di masa depan. Bagaimanapun juga, tuntutan untuk mengembangkan pengetahuan non-agama (pengetahuan umum) adalah kebutuhan nyata yang harus dihadapi para lulusan pesantren di masa depan. Kesalahan-kesalahan dasar dalam pengembangan komponen non-agama dalam kurikulum pesantren selama ini, hingga tidak mampu mendorong pengalaman pengetahuan agama yang mendalam bukanlah harus "diperbaiki " dengan menghilangkan komponen non-agama itu sendiri dari kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren, karena tantangan masa depan "*tokh*" tidak hilang hanya dengan cara tersebut. Masa depan umat manusia, selain menuntut dimilikinya landasan berupa bekal rohani yang kuat, juga akan sangat ditentukan oleh

penguasaan atas perkembangan pengetahuan dan teknologi.<sup>42</sup>

Di sisi lain, materi keagamaan yang merupakan materi pokok di pesantren juga masih cenderung kaku dan eksklusif. Hal itu karena kitab kuning yang merupakan pedoman pokok dalam mengkaji keagamaan hanya lebih menekankan pada bidang fiqih, teologi, tasawuf dan bahasa. Fiqih ini pun biasanya hanya terbatas pada madzhab syafi'i dan kurang memberikan alternatif pada madzhab-madzhab yang lain. Penunggalan kajian fiqih yang hanya menganut salah satu madzhab berakibat membelenggu kreatifitas berfikir dan membuat sempit pemahaman atas elastisitas hukum Islam. Sementara itu juga disinyalir bahwa madzhab syafi'i secara umum memberikan peluang yang

minim kepada penjajahan wawasan rasional.<sup>43</sup>

Kemudian, fanatisme yang tinggi pada ajaran-ajaran sufisme dalam menimbulkan semangat mencapai "kebahagian duniawi" kurang diperhatikan. Kekayaan finansial dianggap menjadi penghalang dalam upaya mencapai kebahagiaan sejati. Konsekuensinya, perekonomian dunia pesantren akhirnya menjadi "tidak menentu".<sup>44</sup>

Kajian kebahasaan dalam kurikulum pesantren menempati posisi yang berlebihan pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang terjelajahi semestinya. Kecerdasan pada nahwu – sharraf belum dapat dimanifestasikan dalam praktek-praktek komunikasi sosial yang efektif. Hal itu, setidaknya-tidaknya disebabkan penekanannya ditujukan semata-mata pada

<sup>42</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi esai-esai Pesantren*, (Lkis, Yogyakarta: 2001), hlm: 136 - 137

<sup>43</sup> Marzuki Wahid et al, *Pesantren Masa Depan: wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren*, (Pustaka Hidayah, 1999), hlm: 212.

<sup>44</sup> *Ibid* hlm: 213

hafalan (tahfidz) *ansich*, dan tidak pada usaha bagaimana menerapkan kemampuan itu dalam struktur verbal kongkret.

Keadaan kurikulum pesantren yang demikian memberikan sebuah konsekuensi pada eksklusivisme pondok pesantren dari pemikiran lain, kecuali pemikiran yang dikembangkan oleh madzhab syafi'i, Asy'ari dan al Ghozali. Bahkan hampir-hampir ajaran Islam hanya dipahami sebagai ajaran yang menyangkut fiqih, teologi dan tasawuf yang dikembangkan oleh ketiga tokoh pemikir masa lampau itu.<sup>45</sup>

Sementara itu metodologi yang dipakai oleh pesantren masih kurang memadai. Seperti diketahui, pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun, karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan

penumpukan keilmuan.<sup>46</sup> Martin Van Bruenessen menyatakan bahwa ilmu yang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tak dapat ditambah, hanya dapat diperjelas dan dirumuskan kembali.<sup>47</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Noercholis Madjid yang dikutip oleh Abdurrahman Kasdi dalam Majalah Pesantren bahwa salah satu kelemahan dari pesantren adalah metodologi yang kurang memadai. Sampai batas-batas tertentu, pola pendidikan yang bersifat penalaran agak tersingkir, sedangkan pola yang bersifat dogmatis agak dominan. Akibatnya, kebiasaan berfikir rasional menjadi berkurang di dunia pesantren.

Sementara itu di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren dipaksa memasuki ruang kontestasi dengan institusi

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Fajar Dunia, 1999), hlm:115

<sup>47</sup> Martin Van Bruenessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Mizan, Bandung, 1999), hlm : 17

pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu *out put* (keluaran) pendidikan. Kompetisi yang kian ketat itu, memosisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas *out put* pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan masyarakat, terutama umat islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya.

Persoalan ini tentu saja berkorelasi positif dengan konteks pengajaran di pesantren. Dimana, secara tidak langsung mengharuskan adanya pembaharuan dalam pelbagai aspek pendidikan di dunia pesantren. Sebut saja misalnya kurikulum, sarana-prasarana, tenaga kependidikan (pegawai administrasi), guru, manajemen (pengelolaan), sistem evaluasi

dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Jika aspek-aspek pendidikan seperti ini tidak mendapatkan perhatian yang proporsional untuk segera (dikembangkan), dan dimodernisasi, atau minimalnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (*social needs and demand*), tentu akan mengancam survival pesantren di masa depan. Masyarakat akan semakin tidak tertarik dan lambat laun akan meninggalkan pendidikan ala pesantren, kemudian lebih memilih institusi pendidikan yang lebih menjamin kualitas *out put*-nya. Pada taraf ini, pesantren berhadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan al Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab klasiknya, tanpa adanya pembaharuan

metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (santri) bisa lebih maksimal, disamping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren.<sup>48</sup>

Dengan begitu, pengembangan pesantren disamping dituntut untuk memasukkan pengetahuan non-agama ke dalam kurikulum pengajarannya, juga agar lebih efektif dan signifikan, praktek pengajaran di pesantren harus menerapkan metodologi yang lebih baru dan modern. Sebab, ketika didaktik-metodik yang diterapkan masih berkuat pada cara-cara lama yang ketinggalan zaman alias kuno, maka selama

itu pula pesantren sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya.

### **Menuju Pesantren Transformatif**

Sejak berdirinya pesantren telah menerapkan kurikulum dengan metode semacam ini. Dalam kajian *fiqh* misalnya santri diharuskan belajar *fathul qorib* dan *fathul mu'in*, dengan titik tekan santri mampu menguasai materi kedua kitab tersebut sampai khatam, meskipun harus dilalui selama bertahun-tahun. Metode yang dipakai pun cukup beragam, mulai dari sorogan, bandongan, hingga diskusi (*bahts al-masail*). Dengan penerapan kurikulum dan metode semacam ini ternyata memang terbukti, bahwa santri secara kompeni dengan sendirinya bisa membaca, mengerti, dan terpenting lagi bisa paham kitab-kitab babon, seperti *fath al wahab*, *al mahalli*, *al muhadzdzab* dan seterusnya.

<sup>48</sup> Ahmad El Chumaidy, *Membongkar Tradisionalisme Pesantren: Sebuah Pilihan Sejarah*, Edisi 06 Oktober 2002, hlm 2

Begitu pula halnya dengan pendelegasian otoritas pengambilan kebijakan dan keputusan untuk mengelola sendiri pada sekolah (MBS) dan pemberian tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan (CBE), juga telah dijalani pesantren. Karena pada prinsipnya pesantren didirikan oleh masyarakat yang kemudian dipercayakan pengelolaannya kepada seorang ulama yang telah diakui kekiaiannya.<sup>49</sup>

Namun begitu, walau bagaimanapun pesantren masih mempunyai banyak kelemahan yang secepatnya harus segera dibenahi.

Abdurrahman Wahid mengungkapkan, ada beberapa kelemahan pesantren antara lain : Pertama, Sifat upaya itu sendiri, yang lebih banyak ditekankan pada pengembangan intelektualisme verbalistis yang

penuh dengan teori muluk-muluk tetapi tak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang praktis yang terjadi di depan mata. *Kedua*, Penanganan kurikulum dan komponen-komponennya secara sepotong-sepotong, tidak menggunakan pendekatan menyeluruh yang bersifat multidisipliner (yang terbukti antara lain dalam pemisahan antara pengetahuan-pengetahuan sosial ekonomi, sosila budaya dan pengetahuan alam). *Ketiga*, Belum tercapainya kesatuan (integrasi) yang utuh dan bulat antara komponen-komponen agama dan non-agama.<sup>50</sup>

Malik Fajar juga mengungkapkan bahwa, ada beberapa kelemahan pesantren, yaitu antara lain : *Pertama*, Dari segi kepemimpinan, pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkis yang berpusat pada kiai. Hal ini

<sup>49</sup> M. Ishom El Saha, Ekses Liberalisasi Pendidikan Terhadap Kajian kepesantrenan, *Jurnal Mihrab*, (Edisi perdana Th: I juni 2003), hlm: 24

<sup>50</sup> Abdurrahman Wahid, *op cit*, hlm: 137

disebabkan karena ikhwal pendirian pesantren biasanya atas usaha pribadi kiai. Maka dalam perkembangan selanjutnya, figur sang kiai sangat menentukan hitam putihnya pesantren. Pola semacam ini tidak pelak lagi melahirkan implikasi manajemen yang otoritaristik. Pembaruan menjadi suatu hal yang sangat sulit dilakukan, karena tergantung pada sikap sang kiai. Lagi pula, pola seperti ini akan berdampak kurang prospektif bagi kesinambungan pesantren di masa depan. *Kedua*, Kelemahan di bidang metodologi. Seperti diketahui, pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun karena kurang adanya improfisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Muhammad Tolhah Hasan seperti dikutip oleh A. Malik Fajar menyatakan bahwa tradisi pengajaran yang demikian membawa dampak lemahnya

kreatifitas. Dan kalau yang mendapat penekanan di pesantren adalah fiqh Oriented, maka penerapan fiqh menjadi teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer. *Ketiga*, Terjadinya disorientasi, yakni pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah perubahan realitas sosial yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini pesantren menghadapi dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar pesantren.<sup>51</sup>

Selain itu, Saefuddin Zuhri mengungkapkan bahwa proses belajar mengajar yang dikembangkan masih saja berorientasi pada bahan atau materi, dan bukan pada tujuan. Proses pembelajaran dianggap telah berhasil bila para santri sudah menguasai betul materi-materi yang ditransfernya dari

<sup>51</sup> A. Malik Fajar. *Op cit*, hlm 116

kitab kuning dengan hafalan yang baik. Apakah para santri kelak akan mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan materi-materi yang telah ditransfernya ketika berhadapan dengan arus dinamika masyarakat? Upaya pemecahan mendasar dari kondisi seperti ini dicari melalui solusi pengembangan wawasan berfikir di kalangan pesantren dengan memperkaya basis metodologi keilmuan (*manhaj al fikr*) selain basis materi (*maddah*) yang selama ini digelutinya. Sebab, bagaimanapun juga salah satu kekurangan dunia pesantren hingga dewasa ini adalah kurangnya pengembangan pemikiran analitis (*nadzariyyah*) dalam tradisi membaca kitab kuning. Sebaliknya, tradisi membaca kitab kuning yang semakin berkembang adalah aspek hafalan dan pemahaman tekstualnya yang terkenal sangat kuat. Padahal, sesungguhnya sebuah komunitas bisa

mengembangkan kemandirian berfikirnya bila tradisi membaca yang dikembangkannya membuka seluas-luasnya dinamisasi penalaran. Solusi terpenting yang bisa diambil mestilah berangkat dari epistemologi keilmuan dengan keharusan melakukan reorientasi makna dan tujuan dalam sistem pendidikan pesantren, yaitu dengan merumuskan kembali kurikulumnya dalam sebuah sistem pendidikan yang padu dan komprehensif (*kaffah*).<sup>52</sup>

Dari beberapa gambaran serta beberapa kelemahan yang telah penulis sebutkan di atas dapat dipahami bahwa pesantren ke depan harus mulai membenah diri dengan melakukan upaya-upaya cerdas untuk merekonstruksi sistem pendidikan (khususnya) kurikulum yang selama ini digunakan. Kurikulum yang dirumuskan semestinya mencerminkan keseimbangan

<sup>52</sup> Saifuddin Zuhri, *Pendidikan pesantren di persimpangan jalan*, op cit, hlm: 204

proporsional dalam kebutuhan manusia akan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat, apresiasi atas potensi akal dan kalbu, pemenuhan atas kebutuhan jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara potensi diri (internal) dan potensi lingkungan (eksternal). Dalam kurikulum yang akan dirumuskannya itu, subyek kajian kitab kuning dikembangkan tidak lagi hanya terbatas pada kajian fiqh, nahwu, shorof, dan tasawuf belaka yang dibaca secara berulang-ulang untuk setiap cabang ilmu yang sama, melainkan juga diperluas lagi cakupannya dengan mengkaji dan menelaah disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya, baik berkaitan dengan ajaran dasar islam maupun dengan ilmu hasil ijtihad manusia.<sup>53</sup> Disamping itu, kajian fiqh di pesantren yang hanya terbatas pada madzhab syafi'i, teologi pada

imam al asy'ari dan al maturidi serta tasawuf pada imam al ghazali, tampaknya penting untuk melebarkan wacana lintas madzhab (*muqaranat al madzahib*). Hal ini untuk lebih mengembangkan wawasan berfikir para santri dan tidak eksklusif menghadapi kenyataan

Demikian pula metodologi mengajar yang cenderung monoton dan menggunakan pendekatan doktrinal mesti ditransformasikan dan diperkaya dengan berbagai metode intruksional modern agar lebih membuka eksplorasi cakrawala pemikiran peserta didiknya.

Selain itu, agenda utama lain dalam mengkonstruksi kurikulum adalah mengorientasikan pendidikan pesantren pada upaya menumbuhkan kembangkan potensi intuisi dan spritualitas peserta didiknya sebagai penyelaras dimensi intelektualitasnya. Dengan demikian, peluang terbentuknya intelektual muslim yang memiliki kepekaan spritual lebih bisa dimungkinkan lahir dari

<sup>53</sup> Suwendi, Rekonstruksi sistem pendidikan pesantren, "*Pesantren Masa Depan: wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren*", (Pustaka Hidayah, 1999), hlm: 205

kalangan pesantren. Bahkan jika melihat dua fungsi pesantren, yakni potensi pendidikan dan potensi pengembangan masyarakat, maka bukan suatu hal yang mustahil dan utopis bila pesantren dapat melahirkan produk ulama' yang memiliki keluasan ilmu dan dapat menjawab tuntutan perubahan sosial.<sup>54</sup>

Dalam konteks ini, sudah saatnya pesantren ke depan disamping harus melakukan pembenahan-pembenahan diri dengan mengubah dan mengembangkan metodologi yang digunakan, juga pesantren dituntut untuk memasukkan komponen-komponen pelajaran umum. Hal ini karena beberapa alasan antara lain, *pertama*, meningkatnya industrialisasi dan diversifikasi struktur-sturktur profesional yang sedang tumbuh menjadikan pendidikan agama secara eksklusif tidak akan memadai untuk mempersiapkan anak didik menghadapi masa

depan. *Kedua*, akibat pembagian kerja yang semakin meningkat dalam profesi-profesi baru spesialisasi menjadi penting. Tantangan tekhnis dan metodis bukan hanya mengena pada penyelenggraan pendidikan di pesantren, tetapi juga menghantam lingkup spesialisasi yang ditawarkan pesantren selama ini. *Ketiga*, pesantren tidak dapat keluar dari perkembangan-perkembangan ini jika ingin tetap *survive* dan terhindar dari kemusproan pendidikan.<sup>55</sup>

Disamping itu dari perspektif metode / proses pendidikan, sebagai konsekuensi dari penerapan Kurikulum Nasional, sudah saatnya pesantren mengubah orientasi pendidikannya dari *teacher oriented* ke *student oriented*. Dengan perubahan orientasi ini, dominasi guru dan kiai dalam penyelenggaraan pendidikan dibatasi. Artinya, santri bukan lagi menjadi obyek yang selalu

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm: 206

<sup>55</sup> Mastuki HS, *Pesantren di tengah Dominasi Liberalisme Pendidikan*, op cit, hlm 11

tertindas oleh dominasi guru yang terlalu tinggi, yang berakibat kreativitas dan dinamisasi santri terkebiri.

Dalam hal ini Paulo Freire, seperti dikutip oleh Moh. Khoiron dalam majalah pesantren menawarkan konsep pendidikan **hadap masalah**, yaitu konsep pendidikan yang berusaha memosisikan santri sebagai subyek belajar dan pribadi yang dilengkapi dengan perangkat kreativitas, inovasi, keterampilan dan kebebasan yang harus dimaksimalkan. Dalam konsep ini, santri sengaja dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan riil yang menuntut dirinya mencari solusi atau pemecahannya. Sebab, pendidikan hadap masalah selalu menegaskan manusia (santri) sebagai makhluk yang berada dalam proses menjadi (*becoming*) makhluk yang tidak sempurna, sebagai sesuatu yang tidak

pernah selesai, dengan realitas yang tidak pernah selesai pula.<sup>56</sup>

Selain hadap masalah, demokratisasi pendidikan pun menjadi sangat penting untuk diterapkan di lembaga pesantren. Sebab, melalui paradigma pendidikan yang demokratis, santri akan dipancing kekritisannya dan kreativitasnya dalam mencari kebenaran dan pengetahuan. Sehingga, pola interaksi subordinatif antara santri dan kiai menjadi hilang dan tergantikan oleh konsep kesetaraan dalam norma dan etika keagamaan. Artinya, dalam penghormatannya kepada kiai sebagai seorang yang berilmu, santri tetap bisa bersikap kritis dalam belajar dan mencari pengetahuan.

<sup>56</sup> Moh. Khoiron, Mencari titik temu pendidikan pesantren: antara salafiyah dan Modern, "Majalah Pesantren", op cit, hlm: 54

**Daftar Pustaka**

- Hasyim Munip, *Pondok Pesantren Berjuang*, (Sinar Wijaya , Surabaya,1992)
- Noer, Ahmad Syafi'I Pesantren: Asal Usul dan Pertumbuhan Kelembagaan,dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan islam diIndonesia*, (Gramidia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001)
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (INIS, Jakarta, 1994)
- Noer Cholis Madjid " *Bilik-Bilik Pesantren*": *Sebuah potret perjalanan*, (Paramadina , Jakarta ,1997)
- Sudjoko Prasodjo et al, *Profil Pesantren*, (LP3ES, Jakarta, 1982)
- Ghazali, M. Bahri , *Pendidikan Pesantren berwawasan Lingkungan*, (Pedoman Ilmu jaya, Jakarta: 2001)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandanga Hidup Kiai*, (LP3ES, Jakarta 1990)
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren*, (Cemara Indah,Jakarta,1978 )
- Basri, Hasan Pesantren : *Karakteristik dan unsur-unsur Kelembagaan*, dalam *Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2001)
- Rahmat,Imdadun *Pesantren Menjajaki Perubahan*; dalam *Majalah Pesantren*, Edisi XI, Januari 2003
- Zaini,Wahid *Dunia Pemikiran Kaun Santri*, (LKM, DIY: 1995)
- UUD RI NO: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal, (Citra Umbara, Bandung: 2003)
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kependidikan*, (Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2001)
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi esai-esai Pesantren*, (Lkis, Yogyakarta: 2001)
- Wahid, Marzuki et al, *Pesantren Masa Depan*: wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren, (Pustaka Hidayah, 1999).
- Fajar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Fajar Dunia,1999)
- Van Bruenessen, Matin, *Kitab Kuning Psantren dan Tarekat*, (Mizan, Bandung, 1999)
- Ahmad El Chumaidy, *Membongkar Tradisionalisme Pesantren*: Sebuah Pilihan Sejarah, Edisi 06 Oktober 2002.
- Ishom El Saha M., Ekses Liberalisasi Pendidikan Terhadap Kajian kepesantrenan, *Jurnal Mihrab*, (Edisi perdana Th: I juni 2003)
- Suwendi, Rekonstruksi sistem pendidikan pesantren, "Pesantren Masa Depan: wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren", (Pustaka Hidayah, 1999), hlm: 205
- Khoiron, Moh. Mencari titik temu pendidikan pesantren: antara salafiyah dan Modern,"*Majalah Pesantren*",tt.